AKADEMIK E-ISSN 2774-8863
Jurnal Mahasiswa Humanis
Vol. 5, No. 2, Mei 2025

Studi Komparatif Kebijakan Amerika Serikat dalam Merespon Kebangkitan Tiongkok pada Masa Pemerintahan Barack Obama dan Donald Trump

Danar Hafidz Adi Wardhana
Universitas Sulawesi Barat, Indonesia
danarhafidz.adiwardhana@unsulbar.ac.id

Submitted: 20th Junuary 2025 | **Edited**: 27th April 2025 | **Issued**: 01st May 2025

Cited on: Wardhana, D. H. A. (2025). Studi Komparatif Kebijakan Amerika Serikat dalam Merespon Kebangkitan Tiongkok pada Masa Pemerintahan Barack Obama dan Donald Trump. *AKADEMIK: Jurnal Mahasiswa Humanis, 5*(2), 789-799.

ABSTRACT

This study discusses a comparative analysis of the United States' policy in responding to the rise of China during the administrations of Barack Obama and Donald Trump. The focus of this research is to analyze the differences in foreign policy approaches applied by both presidents in addressing China's economic, political, and military influence on the global stage. The research method used is qualitative analysis with a descriptive-comparative approach to examine the diplomacy, trade, and security strategies adopted by both administrations. The findings show that the Barack Obama administration emphasized a multilateral approach through cooperation with allied countries and initiatives such as the Trans-Pacific Partnership (TPP) to counter China's economic expansion. In contrast, the Donald Trump administration implemented a more confrontational policy with trade war strategies, high import tariffs, and unilateral policies aimed at economically pressuring China. The conclusion of this study shows that although both administrations had the same objective of limiting China's dominance, their approaches differed significantly. The Obama administration prioritized diplomacy and alliances, while the Trump administration focused on economic pressure and protectionist policies. This study is expected to provide a deeper understanding of the dynamics in the United States-China relations and the implications of both countries' foreign policies in the future.

Keywords: United States, Barack Obama, Donald Trump, Trade War Diplomacy, China

PENDAHULUAN

Setelah Perang Dunia II, Amerika Serikat menjadi pionir dalam penerapan pasar bebas di seluruh dunia. Meskipun konsep ini berasal dari Prancis dengan istilah laissez-faire, penerapannya kemudian meluas ke negara-negara Barat, terutama Amerika Serikat. Dari perspektif budaya, pasar bebas sejalan dengan nilai-nilai demokrasi di Amerika, di mana masyarakat diberikan kebebasan luas untuk beraktivitas selama masih dalam koridor peraturan pemerintah (Blinken, 2017). Kebebasan ini tidak hanya berlaku dalam aspek sosial, tetapi juga dalam aktivitas ekonomi. Dalam sistem pasar bebas,

E-ISSN 2774-8863

produsen memiliki hak untuk menentukan harga produk sesuai keinginannya. Namun, jika harga yang ditetapkan tidak sesuai dengan harga pasar, produk tersebut berisiko tidak laku. Hal ini berkaitan dengan konsep invisible hand, yang menjelaskan bahwa mekanisme pasar dapat menyesuaikan dirinya sendiri tanpa perlu intervensi pemerintah (Nagai, 2018). Dalam konteks ini, interaksi antara permintaan dan produksi secara alami akan membentuk keseimbangan pasar.

Bagi Amerika Serikat, pasar bebas dianggap sebagai strategi utama dalam memulihkan ekonomi global pascaperang (Fergusson, et al., 2016). Sistem ini diyakini mampu meningkatkan dan menstabilkan pertumbuhan ekonomi, baik di negara maju maupun berkembang. Namun, sejak terpilihnya Donald Trump, kebijakan ekonomi AS mulai beralih dari prinsip pasar bebas (Long, 2018). Hal ini terlihat dari keputusan Amerika untuk menarik diri dari berbagai perjanjian dagang internasional serta menerapkan tarif tinggi terhadap produk impor dari Tiongkok. Kebijakan ini bertentangan dengan prinsip pasar bebas, yang pada dasarnya menekankan minimnya campur tangan pemerintah dalam perdagangan. Langkah-langkah Trump ini dianggap sebagai bentuk proteksionisme ekonomi, yang mencerminkan kekhawatiran pemerintah AS terhadap pertumbuhan ekonominya, terutama dalam menghadapi Tiongkok sebagai kekuatan ekonomi baru yang sedang berkembang. Dengan kata lain, kebijakan isolasionisme yang diterapkan Trump merupakan respons terhadap kebangkitan ekonomi Tiongkok.

Jika Donald Trump menerapkan kebijakan isolasionisme, maka Barack Obama mengadopsi pendekatan yang lebih terbuka terhadap Tiongkok dan dunia internasional. Obama menekankan pentingnya membangun hubungan dengan negara lain melalui berbagai organisasi internasional. Dalam konteks ini, Tiongkok juga dipandang sebagai mitra strategis bagi Amerika Serikat dalam menjalin kerja sama. Berdasarkan perbedaan kebijakan antara Trump dan Obama, penelitian ini bertujuan untuk menguraikan kebijakan yang diterapkan oleh masing-masing presiden, menganalisis dampaknya, serta mengevaluasi kebijakan yang paling sesuai untuk diterapkan oleh Amerika Serikat saat ini.

LANDASAN TEORI

Kebijakan ekonomi suatu negara dipengaruhi oleh sistem dan prinsip yang dianut dalam praktik perdagangan internasional. Teori Pasar Bebas, yang berakar dari konsep *laissez-faire* Prancis, menekankan kebebasan ekonomi tanpa intervensi pemerintah. Dalam konteks Amerika Serikat, sistem ini berkembang seiring dengan nilai-nilai demokrasi yang memberikan kebebasan luas bagi masyarakat, termasuk dalam aspek ekonomi. Adam Smith dalam bukunya *The Wealth of Nations* (1776) menjelaskan konsep invisible hand, yang menyatakan bahwa pasar dapat menyeimbangkan dirinya sendiri melalui mekanisme permintaan dan penawaran tanpa perlu keterlibatan aktif pemerintah.

Setelah Perang Dunia II, Amerika Serikat menjadi pelopor dalam penerapan sistem pasar bebas, yang diyakini mampu meningkatkan pertumbuhan ekonomi global. Namun, perubahan kebijakan ekonomi sering kali terjadi akibat dinamika politik. Teori Proteksionisme menjelaskan bagaimana negara dapat mengambil langkah-langkah perlindungan ekonomi, seperti menaikkan tarif impor dan membatasi perdagangan internasional, untuk melindungi industri dalam negeri dari persaingan global.

Kebijakan ekonomi AS mengalami pergeseran signifikan pada masa pemerintahan Donald Trump, yang lebih menekankan proteksionisme sebagai respons terhadap kebangkitan ekonomi Tiongkok. Hal ini bertentangan dengan pendekatan pemerintahan Barack Obama yang lebih terbuka terhadap kerja sama internasional, sebagaimana dijelaskan dalam Teori Hubungan Internasional Liberal, yang menekankan pentingnya kerja sama antarnegara melalui organisasi global untuk mencapai stabilitas ekonomi dan politik. Berdasarkan teori-teori tersebut, penelitian ini bertujuan untuk mengkaji perbandingan kebijakan ekonomi AS di bawah kepemimpinan Obama dan Trump dalam menghadapi kebangkitan ekonomi Tiongkok serta menganalisis dampaknya terhadap perdagangan global.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan pendekatan studi komparatif untuk menganalisis perbedaan kebijakan ekonomi Amerika Serikat di bawah kepemimpinan Barack Obama dan Donald Trump dalam merespons kebangkitan ekonomi Tiongkok. Data yang digunakan dalam penelitian ini bersumber dari data

sekunder, seperti jurnal akademik, buku, laporan pemerintah, serta artikel dari media terpercaya.

Analisis data dilakukan dengan teknik analisis isi (content analysis) untuk mengidentifikasi pola kebijakan ekonomi kedua presiden dan dampaknya terhadap hubungan perdagangan AS-Tiongkok. Penelitian ini juga menerapkan kerangka teori pasar bebas, proteksionisme, dan hubungan internasional liberal guna memahami dinamika kebijakan ekonomi yang diterapkan oleh masing-masing pemerintahan.

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan mengenai implikasi kebijakan ekonomi AS terhadap tatanan perdagangan global serta memberikan perspektif akademis dalam studi hubungan internasional dan ekonomi politik global.

HASIL PENELITIAN

Kebangkitan Ekonomi Tiongkok

Di bawah kepemimpinan Mao Zedong, Tiongkok merupakan negara komunis dengan kondisi ekonomi yang jauh dari kesejahteraan. Mao memiliki ambisi besar untuk menjadikan Tiongkok sebagai negara adidaya, bahkan berusaha menyaingi Uni Soviet, yang saat itu merupakan negara komunis dengan kekuatan ekonomi dan militer yang dominan. Namun, kebijakan yang diterapkan oleh Mao justru berdampak negatif, menyebabkan penderitaan rakyatnya. Pada tahun 1962, tercatat sekitar 42 juta warga Tiongkok meninggal akibat kelaparan setelah pemerintah mengambil alih lahan pertanian pribadi dan mengubahnya menjadi milik negara.

Pada tahun 1975, Deng Xiaoping ditugaskan untuk membenahi ekonomi Tiongkok yang terpuruk akibat kebijakan Mao. Akhirnya, pada tahun 1979, Tiongkok memulai reformasi ekonomi dengan secara bertahap beralih ke sistem pasar bebas. Deng Xiaoping meyakini bahwa satu-satunya cara untuk meningkatkan perekonomian Tiongkok adalah dengan menerapkan sistem pasar bebas (Tisdell, 2019).

Pada tahun 1977, Deng Xiaoping memperkenalkan strategi pembangunan Tiongkok yang berfokus pada empat sektor utama: pertanian, industri, sains dan teknologi, serta pertahanan nasional. Menurutnya, modernisasi di keempat sektor ini sangat penting bagi kemajuan Tiongkok. Kebijakan ini dikenal sebagai *Four Modernizations*. Melalui strategi tersebut, Deng berharap Tiongkok dapat menjadi negara yang sejahtera dan diperhitungkan di dunia internasional (Hsü, 2023).

Sejak diterapkannya reformasi ekonomi, pertumbuhan ekonomi Tiongkok meningkat pesat, dengan rata-rata peningkatan dua kali lipat setiap delapan tahun. Pada tahun 2017, Tiongkok menjadi salah satu negara dengan pertumbuhan ekonomi tercepat di dunia. Saat ini, Tiongkok telah berkembang menjadi kekuatan ekonomi terbesar secara global. Kekuatan ekonomi yang besar ini menjadikan Tiongkok mitra dagang utama bagi Amerika Serikat, baik sebagai sumber impor terbesar maupun sebagai pasar ekspor utama bagi negara tersebut (Petroff, 2018).

Respon Amerika terhadap Kebangkitan Ekonomi Tiongkok

Dengan laju pertumbuhan ekonomi yang sangat pesat di abad ke-21, Tiongkok telah muncul sebagai kekuatan dominan di Asia dan diprediksi akan menjadi kekuatan global yang mampu menyaingi negara-negara maju di Barat, khususnya Amerika Serikat. Hal ini menjadi perhatian bagi Amerika sebagai negara adidaya yang memiliki pengaruh besar dalam tatanan dunia internasional. Selain sektor ekonomi, Tiongkok juga terus melakukan modernisasi militernya hingga menjadi yang terkuat di Asia dan menempati peringkat kedua dalam anggaran militer dunia setelah Amerika Serikat.

Respon Pemerintahan Barack Obama

Setelah menjabat sebagai presiden pada tahun 2009, Barack Obama mulai menyusun kebijakan ekonomi guna meningkatkan stabilitas perekonomian Amerika Serikat. Ia menegaskan bahwa hubungan antara AS dan Tiongkok memiliki peran yang sangat penting di dunia. “Hubungan antara Amerika Serikat dan Tiongkok adalah hubungan bilateral paling signifikan di abad ke-21” (Li, 2016). Berdasarkan pandangan ini, AS dianggap perlu menjaga hubungan baik dengan Tiongkok.

Pada tahun 2011, Obama mengeluarkan kebijakan *Rebalance Policy* (Brandon, 2017), yang bertujuan untuk mempertahankan dominasi Amerika di kawasan Asia-Pasifik. Kebijakan ini juga mencerminkan kekhawatiran AS terhadap modernisasi yang pesat di Tiongkok, yang menandakan era kejayaan negara tersebut setelah 40 tahun melakukan reformasi ekonomi. Selain itu, kebijakan ini menunjukkan pengakuan Amerika terhadap semakin pentingnya kawasan Asia-Pasifik dalam dinamika politik global. Pergeseran fokus kebijakan ini cukup mengejutkan, mengingat selama beberapa dekade sebelumnya, perhatian AS lebih banyak tertuju pada Timur Tengah. *Rebalance Policy* berfokus pada tiga aspek utama, yaitu diplomasi, ekonomi, dan keamanan.

Diplomasi Amerika Serikat

Diplomasi merupakan elemen yang tidak terpisahkan dalam hubungan antarnegara. Dalam kebijakan *Rebalance*, Obama berupaya mempererat serta membangun hubungan diplomatik dengan negara-negara yang berpotensi menjadi sekutu AS. Fokus utama kebijakan ini adalah memperkuat hubungan dengan negara-negara Asia yang memiliki pengaruh besar, seperti Singapura, Vietnam, India, dan Indonesia. Selain itu, AS juga meningkatkan interaksi dengan ASEAN melalui penyelenggaraan US-ASEAN Summit (Bower, 2019).

Dengan Indonesia, Obama mendorong kerja sama di berbagai bidang, termasuk pendidikan, lingkungan, dan kesehatan. Kedekatan pribadi Obama dengan Indonesia—karena pernah tinggal di negara tersebut—membantu mempererat hubungan kedua negara, sekaligus memperbaiki citra AS di mata masyarakat Indonesia, yang sebelumnya dipandang negatif akibat invasi ke Irak dan Afghanistan. Indonesia memiliki daya tarik ekonomi yang strategis bagi AS, mengingat sumber daya alamnya yang melimpah dapat menjadi pemasok bahan mentah, sementara jumlah penduduknya yang besar menjadikannya pasar potensial bagi produk-produk Amerika. Jika Indonesia menjalin hubungan erat dengan Tiongkok, AS berisiko kehilangan sekutu penting di kawasan ini.

Selain Indonesia, India juga menjadi perhatian utama AS. India dianggap berada dalam posisi yang belum menentukan poros geopolitiknya. Sebagai negara yang memiliki senjata nuklir, India memiliki *bargaining power* yang signifikan dalam kancah internasional, ditambah dengan pesatnya perkembangan teknologi informasi di negara tersebut. Dari sudut pandang India, kebangkitan ekonomi Tiongkok memberikan dampak positif sekaligus negatif. Namun, yang menjadi kekhawatiran utama adalah ambisi ekspansi Tiongkok, baik dalam hal teritorial maupun pengaruh ekonomi di kawasan sekitarnya.

Sebagai respons terhadap dinamika ini, India cenderung memilih untuk mendekat ke AS (Roche, 2017). Hal ini terbukti melalui kesepakatan kerja sama di bidang pertahanan dan keamanan regional, ekonomi, energi nuklir, serta hubungan antarwarga (*people-to-people ties*). Kesepakatan ini dicapai pada tahun 2015, ketika Barack Obama mengunjungi New Delhi dan bertemu dengan Perdana Menteri India, Narendra Modi (Parashar & Dasgupta, 2015).

Meskipun AS berupaya menahan ekspansi Tiongkok dengan memperkuat aliansi dengan negara-negara Asia, Tiongkok tetap menjadi fokus utama diplomasi Amerika. Pada tahun 2013, Obama mengadakan pertemuan dengan Presiden Xi Jinping di California dengan tujuan meredakan ketegangan antara kedua negara dan memperkuat komunikasi bilateral.

Untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi AS, Obama menginisiasi Trans-Pacific Partnership (TPP), sebuah organisasi perdagangan bebas yang terdiri dari 12 negara Asia-Pasifik, tanpa melibatkan Tiongkok. TPP bertujuan menciptakan lingkungan ekonomi yang stabil dengan standar perdagangan yang tinggi, termasuk upaya melawan korupsi, perlindungan lingkungan, dan hak buruh. Selain meningkatkan perdagangan dan investasi, TPP juga menghapus pajak ekspor pada 18.000 produk AS. Tidak masuknya Tiongkok dalam TPP menunjukkan upaya AS untuk membatasi pengaruh ekonomi Tiongkok di kawasan. Namun, menjelang pemilihan presiden, kelangsungan TPP menjadi tidak pasti.

Dalam aspek keamanan, kebangkitan ekonomi Tiongkok disertai modernisasi militer, termasuk pembangunan pangkalan militer dan kapal induk. Ekspansi Tiongkok di Laut China Selatan menjadi ancaman bagi negara-negara di sekitarnya. Untuk menyeimbangkan kekuatan di Asia-Pasifik, AS memperkuat kerja sama pertahanan dengan sekutunya seperti Jepang, Korea Selatan, dan Australia. AS juga berupaya membantu negara-negara yang wilayahnya diklaim oleh Tiongkok, seperti Jepang dan Filipina, serta berkomitmen menempatkan 60% angkatan lautnya di Asia-Pasifik pada tahun 2020. Semua kebijakan ini bertujuan untuk mencegah dominasi tunggal Tiongkok di kawasan.

Pemerintahan Donald John Trump

Donald Trump menjadi Presiden ke-45 Amerika Serikat, menggantikan Barack Obama yang telah menjabat selama dua periode. Sebelum terjun ke dunia politik, Trump dikenal sebagai pengusaha real estate ternama sekaligus aktor terkenal. Gaya kepemimpinannya sebagai presiden lebih banyak dipengaruhi oleh insting bisnisnya, berbeda dengan Obama yang berlatar belakang akademisi. Sebelum menjabat, Trump kerap mengungkapkan berbagai kebijakan yang akan diterapkannya, termasuk larangan perjalanan (*Travel Ban*) bagi warga negara mayoritas Muslim dari Timur Tengah serta rencana pembangunan tembok di perbatasan Meksiko. Trump juga sering

menyampaikan pernyataan kontroversial, terutama melalui cuitannya di Twitter. Slogan "America First" yang sering ia gunakan menunjukkan keinginannya untuk mengutamakan kepentingan nasional Amerika Serikat di atas kerja sama internasional.

Setelah resmi menjadi presiden, Trump langsung memusatkan perhatiannya pada peningkatan dan perbaikan ekonomi AS. Ia mengejutkan dunia dengan menaikkan tarif impor terhadap produk dari Kanada, Uni Eropa, dan Tiongkok. Kebijakan ini memicu respons dari negara-negara tersebut, yang kemudian memberlakukan kenaikan tarif pada barang-barang impor asal AS. Situasi ini memunculkan perang dagang—di mana dua atau lebih negara saling menaikkan tarif dan membatasi kuota impor satu sama lain (Amadeo, 2018).

Pada Maret 2018, Trump mengumumkan tarif impor sebesar 25% untuk baja dan 10% untuk aluminium. Ia bahkan menyatakan dalam sebuah unggahan di Twitter bahwa perang dagang akan mudah dimenangkan oleh Amerika (Franck, 2018). Kebijakan ini memicu reaksi global, terutama karena melibatkan tiga kekuatan ekonomi terbesar dunia. Delapan negara—termasuk Kanada, Meksiko, India, Uni Eropa, Norwegia, Swiss, Rusia, dan Tiongkok—menyatakan ketidaksetujuannya terhadap kebijakan tersebut.

Selain itu, pada Agustus 2018, Trump mengumumkan kenaikan tarif untuk impor aluminium dan baja dari Turki, yang tidak hanya bermotif ekonomi tetapi juga berkaitan dengan upaya pembebasan Andrew Brunson, seorang warga negara AS yang ditahan oleh pemerintah Turki atas tuduhan keterlibatan dalam kudeta 2016. Dampak dari kebijakan ini menyebabkan nilai tukar Lira Turki anjlok ke level terendah dalam beberapa dekade terhadap dolar AS (O'Brien, 2018), yang berpotensi mengganggu stabilitas ekonomi di Eropa.

Perang Dagang AS-Tiongkok

Perang dagang antara Amerika Serikat dan Tiongkok bermula ketika Presiden Donald Trump memberlakukan tarif serta kuota impor terhadap panel surya dan mesin cuci asal Tiongkok. Kebijakan ini berdampak signifikan karena Tiongkok merupakan eksportir panel surya terbesar di dunia. Namun, Organisasi Perdagangan Dunia (WTO) sebagai pengawas perdagangan global tidak mempermasalahkan langkah yang diambil Amerika. Sebagai tanggapan, Tiongkok mengajukan nota keberatan kepada WTO (McDonald, 2018).

Setelah memberlakukan tarif pada panel surya, Trump kemudian meminta Tiongkok untuk menyusun strategi guna menurunkan defisit perdagangan Amerika dari $375 miliar menjadi $100 miliar pada Maret. Di bulan yang sama, ia mengumumkan rencana untuk mengenakan tarif sebesar $60 miliar terhadap barang impor dari Tiongkok serta membatasi transfer teknologi ke negara tersebut. Pembatasan ini dilakukan karena banyak perusahaan Tiongkok yang diduga melanggar hak kekayaan intelektual (*Intellectual Property Rights*).

Pada April, Amerika Serikat kembali menaikkan tarif terhadap barang elektronik dan mesin asal Tiongkok senilai $50 miliar. Sebagai respons, Tiongkok menerapkan kebijakan yang merugikan ekonomi AS dengan menghentikan impor kedelai dari Amerika (Cheng, 2018). Mengingat Tiongkok merupakan pasar utama kedelai bagi Amerika, kebijakan ini menyebabkan kelebihan produksi (*overproduction*) yang berpotensi menimbulkan kerugian ekonomi dalam skala nasional.

Pada Mei, Trump mengajukan lima tuntutan kepada Tiongkok:

1. Menghentikan subsidi bagi perusahaan teknologi Tiongkok.
2. Mengakhiri praktik pencurian rahasia dagang (*Trade Secret*) dan hak kekayaan intelektual (*Intellectual Property*).
3. Mengurangi tarif terhadap produk-produk Amerika pada tahun 2020.
4. Memberikan peluang investasi yang lebih besar bagi perusahaan Amerika di Tiongkok.
5. Mengurangi defisit perdagangan Amerika sebesar $200 miliar pada tahun 2020.

Sepanjang tahun 2018, ketegangan perdagangan antara Amerika Serikat dan Tiongkok berlangsung dengan sangat intens. Pada awal Desember, Presiden Donald Trump dan Presiden Xi Jinping bertemu dalam forum G-20. Hasil pertemuan tersebut membuat Amerika menunda kenaikan tarif tambahan hingga tahun 2019, dengan catatan tergantung pada hasil kesepakatan yang akan dicapai. Sebagai respons, Tiongkok menurunkan tarif impor untuk produk otomotif Amerika, dari sebelumnya 40 persen saat awal perang dagang menjadi 15 persen (Long, 2018). Keputusan ini memberikan sedikit kelonggaran bagi kedua negara serta ekonomi global. Jika konflik perdagangan terus berlanjut, dampaknya bisa merugikan perekonomian dunia secara signifikan.

KESIMPULAN

Obama dan Trump memiliki pendekatan berbeda dalam menghadapi kebangkitan Tiongkok, tetapi keduanya mencerminkan kekhawatiran Amerika terhadap ancaman terhadap hegemoninya. Obama berusaha membangun citra Amerika sebagai sekutu yang baik dengan kebijakan *rebalance,* sedangkan Trump mengambil langkah lebih defensif, seperti menarik diri dari kerja sama internasional dan memulai perang dagang.

Amerika menghadapi tantangan ekonomi karena tingginya konsumsi barang Tiongkok dibandingkan ekspornya sendiri, yang sebagian besar disebabkan oleh harga produk Amerika yang lebih tinggi. Dalam konteks *comparative advantage*, Amerika unggul dalam teknologi dan pertanian, tetapi masih kalah dari Tiongkok dalam hal jumlah dan variasi produk unggulan. Untuk menjaga stabilitas ekonomi, Amerika perlu meningkatkan industri dalam negeri dan memberikan subsidi, meskipun bertentangan dengan prinsip pasar bebas.

Demi mempertahankan dominasinya, Amerika harus menyeimbangkan hubungan diplomasi dengan strategi ekonomi yang lebih kuat. Kebijakan tarif Trump bertujuan meningkatkan ekspor, tetapi seharusnya juga berfokus pada peningkatan produksi dalam negeri. Jika Amerika mampu mengatasi tantangan ekonominya, maka posisinya sebagai kekuatan global dapat tetap terjaga dan tidak tersaingi oleh Tiongkok.

DAFTAR PUSTAKA

Amadeo, K. (2018, December). *Trade Wars and How They Affect You*. Retrieved from www.thebalance.com: https://www.thebalance.com/trade-wars-definition-how-it-affects-you-4159973

Blinken, A. (2017, May 15). *U.S.-China Relations: Strategic Challenges and Opportunities*. Retrieved from U.S. Department of State: http://www.state.gov/s/d/2016d/256657.htm

Bower, E. Z. (2019, November 9). *U.S.-ASEAN Summit: President Obama Engages Southeast Asia*. Retrieved from https://www.csis.org:

Brandon, J. J. (2017, November). *U.S. Administration's Rebalance Toward Asia, with Emphasis on Southeast Asia*. Retrieved from https://asiafoundation.org: https://asiafoundation.org/2012/11/14/u-s-administrations-rebalance-toward-asia-with-emphasis-on-southeast-asia/

Cheng, E. (2018, May 2). *It appears China has stopped buying soybeans from the US altogether because of trade fight*. Retrieved from https://www.cnbc.com: https://www.cnbc.com/2018/05/02/it-appears-china-has-stopped-buying-soybeans-from-the-us-altogether-because-of-trade-fight.html

Fergusson, I. F., McMinimy, M., & Williams, B. (2016). *In Brief, Congressional Research Service Report*. Retrieved from https://fas.org:

Franck, T. (2018, March). *Trump doubles down: 'Trade wars are good, and easy to win'*. Retrieved from www.cnbc.com: https://www.cnbc.com/2018/03/02/trump-trade-wars-are-good-and-easy-to-win.html

Hsü, I. C.-Y. (2023). *Economic Development in China After Mao*. Retrieved from San José State University : http://www.sjsu.edu/faculty/watkins/china2.htm

Li, C. (2016, August 30). *Assessing U.S.-China relations under the Obama administration*.

Long, H. (2018, May 04). *Trump is asking China to redo just about everything with its economy*.

McDonald, J. (2018, August 15). *China files WTO challenge to US tariffs on solar panels*. Retrieved from https://apnews.com: https://apnews.com/385dfd35eb3f41068a73a81a2ad2219a

Nagai, O. (2018, November 27). *China confirms its third aircraft carrier in the works*.

O'Brien, M. (2018, August 8). *Turkey is fighting an 'economic war'—against reality*.

Parashar, S., & Dasgupta, S. (2015, April 05). *India's Asia-Pacific vision makes the Chinese dragon uneasy*. Retrieved from http://www.lexisnexis.com.ezproxy: umw.edu/hottopics/lnacademic/?

Petroff, A. (2018, December 15). *These are America's biggest trading partners*.

Roche, E. (2017, January 20). *Barack Obama reviews India-US ties in farewell call to Narendra Modi*. R

Tisdell, C. (2019, June). *Economic Reform and Openness in China: China's Development Policies in the Last 30 Years*. https://espace.library.uq.edu.au/data/UQ_275734/WP_55.pdf?Expires=1545289327&Signature=ZNB3VON5LtpHMKEaM3xWcN0-11Nyp5XcEoKrH1xe0hUk2tZhtG9ljU4q~0lemc67rxHAJXYjK4C8YSIZV1kyD7TwduAAMc0V9I1BTLbus7zSys9XQwqzOFdRPx0ZvklfwIdf~9tbWoyoSb5iWPnaaBXOHWWqxktJTC~AIp7n